



## DIAKOMODASI MELALUI PROGRAM PDPD

# Jaminan Persalinan Terbuka bagi Warga

**YOGYA (KR)** - Penduduk Kota Yogyakarta yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak perlu khawatir ketika hendak menjalani persalinan. Hal ini lantaran jaminan persalinan terbuka bagi warga kota melalui program Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PDPD).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani, program PDPD sejak awal digulirkan guna mengakomodir warga yang belum terakses JKN karena berbagai sebab. "Semua penduduk yang memiliki KTP Kota Yogya dan memenuhi syarat perawatan sesuai aturan, bisa mengakses jaminan persalinan," jelasnya, Jumat (22/7).

Syarat yang diberlakukan adalah pasien bersedia dirawat di ruang kelas

tiga. Hal tersebut selaras dengan hak peserta JKN yang difasilitasi pemerintah. "Jadi, asalkan pasien mau menjalani perawatan di kelas tiga, bisa mengakses jaminan persalinan," imbuhnya.

Emma menguraikan, Kota Yogya sudah terlebih dulu memberikan jaminan persalinan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dibiayai oleh APBD. Akan tetapi, layanan tersebut berubah seiring dengan diberlakukannya program universal coverage melalui JKN. "Pemerintah Kota Yogya tetap berupaya memberikan dukungan pemberian jaminan persalinan melalui program PDPD dengan sistem sesuai JKN bagi warga yang belum tercover," urainya.

Dengan mengakses jaminan persalinan melalui PDPD, warga Kota Yogya

juga bisa memperoleh keuntungan sesuai aturan yang berlaku saat melahirkan. Dengan begitu hak atau fasilitas yang diterima oleh pasien tidak jauh berbeda dengan aturan terbaru yang ditetapkan pemerintah yakni Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 yang berlaku sejak 12 Juli lalu. Aturan tersebut berkaitan dengan peningkatan akses kesehatan bagi ibu hamil.

Dirinya berharap pemberian akses layanan kepada ibu melahirkan yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan potensi kematian ibu dan bayi. Pemantauan kesehatan selama kehamilan juga dilakukan oleh kader yang ada di tiap wilayah, sehingga kesehatan ibu dan bayi pun selalu terpantau. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005